

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad Rifai, 2010, "*Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Amalia Syauket, 2022, "*Buku Ajar Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Edisi Ke-1 Dalam Bingkai Pencegahan Menuju Indonesia Bebas Korupsi*", Ubhara Jaya Press, Bekasi.
- Andi Hamzah, 1996 "*Pengantar Hukum Acara Pidana*", Liberty, Yogyakarta.
- Ani Purwati, 2020, "*Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*", Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Choky R. Ramadhan (ed), 2015, "*Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi*", Klinik Hukum fakultas Hukum Universitas Indonesia & MaPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Diky Anandya dan Lalola Ester, 2023, "*Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022*", Indonesian Corruption Watch.
- Febby Mutiara Nelson, 2020, "*Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Indonesian Corruption Watch, 2021, "*Laporan Pemantauan Dua Tahun Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2021*".
- Ishaq, 2017, "*Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*", Alfabeta, Bandung.
- Joko Sriwidodo, 2020, "*Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", Kepel Press, Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Prananda Media Group, Depok.
- Laola Easter, Kurnia Ramadhana, dkk, 2021, "*Laporan Hasil Eksaminasi Publik Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI Terdakwa Pinangki Sirna Mala Sari*", Indonesian Corruption Watch.
- Lexy J. Moleong, 2020, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2012 "*Hukum Acara Pidana*", Citra Aditya, Bandung.

Lilik mulyadi, 2010 “*Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lukman Hakim, Ika Dewi S, dkk, “*Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”, Deepublish, Yogyakarta, 2019

Muhammad Najih, 2014, “*Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaruan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*”, Setara Press, Malang.

M. Yahya Harahap, “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, “*Pembaharuan KUHAP Menurut Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*”, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta.

R. Wiyono, 2008, “*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Sinar Grafika, Jakarta.

R Subekti, 2007, “*Hukum Pembuktian*”, Pradnya Paramita, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2007, “*Hukum Acara Pidana Kontemporer*”, Citra Aditya, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2008, “*Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*”, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2017, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syaiful Bakhri, 2009, “*Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*”, Total Media, Yogyakarta.

## **SKRIPSI**

Ananda Teguh Perkasa Ginting, 2019, “*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Oleh Anak*”, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Luqman Wahyudi, 2013, “*Reorientasi Dan Reformulasi Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia Sebagai Upaya Mewujudkan Nilai Keadilan Restorative Menuju Paradigma Pemidanaan Berperikemanusiaan*”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

## JURNAL HUKUM

Abdurrahman dan Ufran, 2014, "*Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Analisis Putusan Mahkamah Agung No.1616K/PID.SUS/2013*", Jurnal Parkesia, Universitas Mataram, Volume 3 Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Apri Listiyanto, 2018, "*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*", Jurnal Rechts Vinding,

Debora Sekar Arum, 2022, "*Hal-Hal Memberatkan dan Meringankan Yang Ideal: Penilaian Terhadap Putusan-Putusan Tindak Pidana Korupsi*", Jurnal Antikorupsi Integritas, Volume 8 Nomor 2, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Dwi Hananta, 2018, "*Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 1 Maret, Pengadilan Negeri Kediri, Kediri.

Eva Yulia dan Emmillia Rusdiana, 2022, "*Alasan Pemberat Pada Tindak Pidana Korupsi Oleh Menteri Sosial Dalam Putusan No. 29/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT. PST*", Jurnal Novum, Volume 01 Nomor 01, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.

Eske N Worang dan Deizen D rompas, 2023, "*Pertimbangan Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*", Jurnal Hukum Unsrat, Lex Crimen Vol.XII/No.2/Mar/2023, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Fransico Mekel, Olga A. Pangkerego, dkk, 2020, "*Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*", Lex Administratum, Volume VIII Nomor 4, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Helmi Muammar, Wawan Kurniawan dkk, 2021, "*Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*", Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol. 3 No 2, Universitas Janabadra Yogyakarta, Yogyakarta.

Hisar Sitohang, Martono Anggusti, dkk, 2018, "*Analisa Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan dalam Bentuk Penyuaan Aktif*", Patik Jurnal Hukum, Volume 07 Nomor 02, 2018, Universitas HKBP Nommensen, Medan.

- Mita Nur Aisah, Beniharmoni Harefa, dkk, 2022, "*Disparitas Pidana Terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi*", Jurnal Esensi Hukum, Volume 4 Nomor 1, 2022, UPN Veteran Jakarta, Jakarta.
- Ni Ketut Ngetis Megi Megayani dan Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi, 2020, "*Gagasan Model Plea Bargaining di Indonesia Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*", Jurnal Kertha Desa, Volume 9 Nomor 12, Universitas Udayana, Denpasar.
- Orin Gusta Andini, Fitrah Marinda, dkk, 2022 "*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara*", Jurnal Alqadau, Volume 9 Nomor 1, Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Randy Pradityo, 2018, "*Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Satu Tinjauan Singkat*", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu.
- Rifi Hermawati, "*Studi Perbandingan Hukum Plea Bargaining System di Amerika Serikat dengan Jalur Khusus di Indonesia*", Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 4 Nomor 1, Universitas Padjadjaran, 2023
- Riki Rianto, "*Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*", (Studi Putusan Nomor:16/PID.SUS/TKP/2017/PN.SBY, NOMOR: 126 / PID.SUSTPK/2015/PN.JKT.PST dan Nomor: 54/PID.B/TKP/2012/PN.JKT.PST), JOM, Vol. VIII No. 2, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2021
- Robert R. Strang, "*More adversarial, but Not Completely Advesorial: Reformasi of The Indonesian Criminal Procedure Code*", Jurnal Fordham International Law, Volume 32 Nomor 118.
- Ruchoyah, "*Urgensi Plea Bargaining System Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perbandingan Plea Bargaining system di Amerika Serikat*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 27 Issue 2 Mei, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020
- Sri Devy G.B, 2018, "*Akuntabilitas Lembaga Peradilan Yang Mandiri Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*", Lex Administratum, Volume VI Nomor 4, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Yuniar Wahyu Tristanto, 2017, "*Tinjauan Yuridis Penerapan Plea Bargaining untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan di Indonesia*". Jurnal AHKAM, Volume 6 Nomor 2, PKPA Peradi Rumah Bersama Advokat.

Ziyad, 2018, “*Konsep Plea Bargaining Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Negara*”, Badamai Law Jurnal, Volume 3 Issues 1, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **INTERNET**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaan> diakses pada 10 September 2023

Hukum Online, “*11 Hal Yang Wajib Dipertimbangkan Hakim Dalam Pemidanaan*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/11-hal-yang-wajib-dipertimbangkan-hakim-dalam-pemidanaan-lt616510607b4d4?page=all> tanggal akses 10 Mei 2023.

Katadata, “*Ada 1.351 Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani KPK Sepanjang 2004 Hingga 2022*”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/ada-1351-kasus-tindak-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk-sepanjang-2004-hingga-2022>, tanggal akses 10 Mei 2023.

Kompas.com, “*Kilas Balik Kasus Jaksa Pinangki, Dari Viral Di Medsos Hingga Keengganan JPU Ajukan Kasasi*”, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/07/200500965/kilas-balik-kasus-jaksa-pinangki-dari-viral-di-medsos-hingga-keengganan-jpu?page=all>, diakses pada 9 September 2023

Program Pasca Sarjana UMSU, "*Penerapan Plea Bargaining di Indonesia*",  
<https://pascasarjana.umsu.ac.id/penerapan-plea-bargaining-di-indonesia/>, tanggal akses 2 Oktober 2023.

Pusat Edukasi Anti Korupsi, "*Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini*",  
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>, tanggal akses 11 Mei 2023.

